



**KLIPING DIGITAL
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN**

15 – 16 Maret 2022



KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

16 / 03 / 2022

Analisis Pemberitaan Media Online

NO	ANALISIS		TONE
1	TANGGAL	Selasa, 15 Maret 2022	+
	MEDIA	https://www.rumah.com/berita-properti/2022/3/204064/kpr-subsisi-flpp-ditargetkan-bisa-tersalurkan-sesuai-target-tahun-ini	
	JUDUL	KPR Subsidi FLPP Ditargetkan Bisa Tersalurkan Sesuai Target Tahun Ini	
	NARASUMBER	Komisioner BP Tapera Adi Setianto	
	RESUME	BP Tapera optimistis akan bisa menyalurkan KPR subsidi FLPP pada tahun 2022 ini. Tahun ini BP Tapera ditarget menyalurkan sebanyak 200 ribu unit rumah senilai Rp23 triliun dan tren penyaluran sejak awal tahun ini terus menunjukkan peningkatan. Sejak BP Tapera ditunjuk sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) pada akhir tahun lalu, KPR FLPP yang disalurkan terus memperlihatkan peningkatan. Hingga tanggal 11 Maret 2022, penyaluran FLPP telah mencapai 27.257 unit senilai Rp3,01 triliun. Total penyalurann KPR FLPP sejak tahun 2010 lalu mencapai Rp78,19 triliun untuk membiayai 970.836 unit rumah. Untuk tahun 2022 ini BP Tapera ditargetkan menyalurkan KPR FLPP sebanyak 200 ribu unit dengan anggaran mencapai Rp23 triliun. Perinciannya, Rp19,1 triliun dana FLPP dari alokasi APBN dan Rp3,9 triliun dari dana bergulir atau pengembalian pokok yang dicicil oleh nasabah.	
2	TANGGAL	Selasa, 15 Maret 2022	+
	MEDIA	https://www.validnews.id/ekonomi/dpr-milenial-belum-banyak-tahu-insentif-pembelian-properti	
	JUDUL	DPR: Milenial Belum Banyak Tahu Insentif Pembelian Properti	
	NARASUMBER	Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat	



KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

16 / 03 / 2022

Analisis Pemberitaan Media Online

	RESUME	Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat mengatakan, saat ini fenomena backlog perumahan dapat diatasi dengan meningkatkan alokasi anggaran pemerintah untuk sektor perumahan, dan perlunya skema pembiayaan yang tepat. BPS menyebut jumlah warga yang masuk kategori usia milenial mencapai 63,5 juta jiwa. Saat ini, jumlah populasi milenial mendominasi piramida penduduk Indonesia. Kementerian PUPR juga menyatakan, jumlah backlog perumahan di Indonesia bisa mencapai 11 juta unit. Adapun dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah menargetkan pengurangan backlog tersebut hingga 6,7 juta unit. Dana tersebut merupakan PMN yang diberikan pemerintah sebesar Rp2,25 triliun pada 2021, yang dicampur dengan dana dari penerbitan surat utang. Kemudian digunakan untuk mendukung program KPR FLPP dalam memenuhi target subsidi pembiayaan KPR FLPP bagi 157.500 unit rumah pada 2021 bagi MBR.	
3	TANGGAL MEDIA JUDUL NARASUMBER RESUME	Selasa, 15 Maret 2022 https://m.tribunnews.com/properti/2022/03/15/kementerian-pupr-ajak-pengembang-garap-pasar-milenial-untuk-tekan-backlog-perumahan Kementerian PUPR Ajak Pengembang Garap Pasar Milenial untuk Tekan Backlog Perumahan Staf Khusus Menteri Bidang Perumahan Kementerian PUPR Iskandar Saleh Staf Khusus Menteri Bidang Perumahan Kementerian PUPR Iskandar Saleh menilai sektor properti yang didukung konsumen milenial akan semakin tumbuh positif tahun ini. Dia mengungkapkan, pemerintah dalam RPJMN 2020 hingga 2024 menargetkan pengurangan backlog dari semula 11 juta unit menjadi 6,7 juta unit. Sementara untuk tahun ini, sasaran itu dijabarkan dalam sejumlah program, di antaranya Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 200 ribu unit dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) 200 ribu unit. Selain itu, ada program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) 312 unit, BP Tapera 100 ribu unit, dan dari PT. Sarana Multigriya Finansial (SMF) 10 ribu unit.	+
4	TANGGAL MEDIA	Selasa, 15 Maret 2022 https://www.beritasatu.com/ekonomi/902965/bp-tapera-optimistis-capai-target-pembiayaan-rumah-subsidi/?view=all	+



KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

16 / 03 / 2022

Analisis Pemberitaan Media Online

	JUDUL	BP Tapera Optimistis Capai Target Pembiayaan Rumah Subsidi	
	NARASUMBER	Komisioner BP Tapera, Adi Setianto	
	RESUME	Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) optimistis mampu menyelesaikan target pembiayaan <u>rumah subsidi</u> tahun 2022 yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Menurut Komisioner BP Tapera, Adi Setianto sejak ditunjuk sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) pada 22 Desember 2021 dan setelah dikeluarkannya izin penyaluran dana FLPP oleh Kementerian Keuangan pada 17 Februari 2022 lalu, penyaluran dana FLPP terus memperlihatkan perkembangan yang sangat menjanjikan. Penyaluran dana FLPP per 11 Maret 2022 telah mencapai 27.257 unit senilai Rp 3,01 triliun. Sehingga total penyaluran dana FLPP selama periode 2010-2022 sudah mencapai 970.836 unit senilai Rp 78,19 triliun. Pada tahun 2022, BP Tapera ditargetkan menyalurkan pembiayaan FLPP sebanyak 200.000 unit rumah dan optimalisasi sebesar 26.000 unit rumah dengan alokasi pendanaan sebesar Rp23 triliun (Rp19,1 triliun dari alokasi APBN 2022 dan Rp3,9 triliun dari pengembalian pokok).	
5	TANGGAL	Rabu, 16 Maret 2022	
	MEDIA	https://www.kompas.com/properti/read/2022/03/16/070000321/guyur-rp-3-01-triliun-bp-tapera-optimistis-capai-target-pembiayaan-flpp	
	JUDUL	Guyur Rp 3,01 Triliun, BP Tapera Optimistis Capai Target Pembiayaan FLPP 2022	
	NARASUMBER	Komisioner BP Tapera Adi Setianto	
	RESUME	Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) telah menyalurkan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp 3,01 triliun untuk membiayai 27.257 unit rumah per 11 Maret 2022. Sehingga, total penyaluran dana FLPP selama periode 2010-2022 sudah mencapai 970.836 unit senilai Rp 78,19 triliun. Pada tahun 2022, BP Tapera ditargetkan menyalurkan pembiayaan FLPP sebanyak 200.000 unit rumah dan optimalisasi sebesar 26.000 unit rumah dengan alokasi pendanaan	+



KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

16 / 03 / 2022

| Analisis Pemberitaan Media Online

	sebesar Rp 23 triliun. Dana tersebut terdiri dari Rp 19,1 triliun dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 dan Rp 3,9 triliun dari pengembalian pokok.	
--	---	--



15 / 03 / 2022

Sumber: rumah.com

KPR Subsidi FLPP Ditargetkan Bisa Tersalurkan Sesuai Target Tahun Ini

Author: Wahyu Ardiyanto

RumahCom – BP Tapera optimistis akan bisa menyalurkan KPR subsidi FLPP pada tahun 2022 ini. Tahun ini BP Tapera ditarget menyalurkan sebanyak 200 ribu unit rumah senilai Rp23 triliun dan tren penyaluran sejak awal tahun ini terus menunjukkan peningkatan.

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) terus mendorong penyaluran KPR subsidi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) pada tahun ini. Menurut Komisioner BP Tapera Adi Setianto, BP Tapera optimistis bisa menyelesaikan target pembiayaan perumahan melalui skema KPR FLPP yang ditetapkan Kementerian Keuangan.

“Kami melihat bank-bank penyalur juga sangat bersemangat sehingga kami optimistis bisa memenuhi target penyaluran KPR FLPP pada tahun 2022 ini dan itu terlihat dari tren yang terus meningkat sejak awal tahun ini. Kami juga akan terus berupaya menjaga pengelolaan dana FLPP sesuai tujuan investasi pemerintah,” ujarnya.

BP Tapera merupakan instansi yang mengutip iuran dari seluruh pekerja untuk tabungan dan pembiayaan perumahan dan ditambah dengan tugas menyalurkan KPR FLPP yang sebelumnya disalurkan oleh Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP). KPR FLPP ditujukan untuk segmen masyarakat berpenghasilan

rendah (MBR) sehingga bisa mengakses perumahan yang layak dan terjangkau.

Sejak BP Tapera ditunjuk sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) pada akhir tahun lalu, KPR FLPP yang disalurkan terus memperlihatkan peningkatan. Hingga tanggal 11 Maret 2022, penyaluran FLPP telah mencapai 27.257 unit senilai Rp3,01 triliun. Total penyaluran KPR FLPP sejak tahun 2010 lalu mencapai Rp78,19 triliun untuk membiayai 970.836 unit rumah.

Untuk tahun 2022 ini BP Tapera ditargetkan menyalurkan KPR FLPP sebanyak 200 ribu unit dengan anggaran mencapai Rp23 triliun. Perinciannya, Rp19,1 triliun dana FLPP dari alokasi APBN dan Rp3,9 triliun dari dana bergulir atau pengembalian pokok yang dicicil oleh nasabah.

BP Tapera juga terus mendorong berbagai pihak khususnya bank penyalur untuk ikut memastikan ketepatan sasaran program maupun memastikan rumah yang dibangun pengembang telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Hal ini untuk menjamin masyarakat penerima mendapatkan rumah yang layak dan berkualitas.

“Kami juga terus memantau berbagai indikator terkait layanan bank penyalur misalnya realisasi penyaluran KPR FLPP, ketepatan Sasaran, tingkat keterhunian rumah yang telah diserahterimakan,



KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

15 / 03 / 2022

| Sumber: rumah.com

akuntabilitas pengelolaan dana, dan berbagai indikator lainnya,” pungkas Adi.

<https://www.rumah.com/berita-properti/2022/3/204064/kpr-subsisi-flpp-ditargetkan-bisa-tersalurkan-sesuai-target-tahun-ini>



15 / 03 / 2022

Sumber: validnews.id

DPR: Milenial Belum Banyak Tahu Insentif Pembelian Properti

Penulis: Khairul Kahfi

Editor: Peksi Cahyo

TASIKMALAYA – Legislator mendukung upaya pemerintah untuk memperkecil kondisi kesenjangan, antara jumlah rumah terbangun dan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat. Kalangan milenial masih minim mengetahui insentif yang sudah disiapkan pemerintah.

Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat mengatakan, saat ini fenomena backlog perumahan dapat diatasi dengan meningkatkan alokasi anggaran pemerintah untuk sektor perumahan, dan perlunya skema pembiayaan yang tepat.

BPS menyebut jumlah warga yang masuk kategori usia milenial mencapai 63,5 juta jiwa. Saat ini, jumlah populasi milenial mendominasi piramida penduduk Indonesia.

“Hanya saja kaum yang beranjak menjadi tumpuan perekonomian negara ini masih terilit persoalan mendasar, yakni kesulitan memiliki rumah,” tuturnya dalam keterangan pers, Jakarta, Selasa (15/3).

Sebelumnya, Kementerian PUPR meminta para pengembang dan stakeholder sektor properti mengurangi backlog perumahan di Indonesia. Salah satunya, dengan memaksimalkan potensi hunian milenial dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau MBR.

Kementerian PUPR juga menyatakan, jumlah backlog perumahan di Indonesia

bisa mencapai 11 juta unit. Adapun dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah menargetkan pengurangan backlog tersebut hingga 6,7 juta unit.

Untuk itu, Toriq bilang, dirinya bersyukur karena pemerintah mengeluarkan berbagai insentif di bidang properti untuk mendorong bisnis ini kembali bergairah di masa pandemi.

Seperti pembebasan PPN, kebijakan uang muka nol persen untuk semua tipe properti, penurunan drastis bunga acuan, sampai penurunan bunga kredit termasuk kredit konsumsi untuk pembelian properti (KPR).

“Namun, sayangnya semua kemudahan untuk membeli properti itu belum diketahui kebanyakan konsumen, terutama kalangan milenial dan MBR,” ucap Toriq.

Ia menilai, hal tersebut bisa terjadi karena kurangnya sosialisasi program insentif. Bukan hanya dari sosialisasi pemerintah, tetapi juga kalangan developer.

Akibatnya, berbagai insentif properti itu tidak sampai kepada masyarakat. Tidak mengherankan juga, berbagai relaksasi terhadap pemasaran produk properti belum memiliki pengaruh yang signifikan.

Survei Indonesia Property Watch (IPW) per akhir Maret 2021 menyatakan, sebanyak 91% masyarakat belum mengetahui adanya pembebasan PPN untuk pembelian rumah



15 / 03 / 2022

Sumber: validnews.id

seharga hingga Rp5 miliar/unit, yang berlaku sampai 31 Agustus 2021.

“Lebih dari 75% konsumen belum mengetahui kebijakan DP nol persen. Sedangkan, lebih dari 53% merasa bunga KPR saat ini belum berubah, yakni masih di kisaran 12% per tahun,” tutur Toriq.

Menurutnya, kurangnya sosialisasi juga membuat sekitar 52% pengembang mengaku kalau berbagai insentif di bidang properti belum memberikan pengaruh terhadap penjualan mereka. Sebaliknya, developer yang telah mendapatkan sosialisasi, bisa meningkatkan penjualannya.

Ke depannya, ia berharap, kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan dalam rangka mengurangi backlog perumahan di Indonesia dapat lebih ditingkatkan potensinya.

“Dibarengi dengan sistem sosialisasi yang masif dan tepat kepada seluruh stakeholder dan masyarakat, khususnya konsumen milenial di Indonesia,” tutup Toriq.

Sejumlah Insentif

Melansir *Antara*, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, fasilitas likuiditas untuk pembiayaan perumahan yang dikelola PT Sarana Multigriya Finansial/SMF (Persero) telah memberikan dukungan bagi masyarakat, terutama masyarakat berpendapatan rendah dalam mendapatkan rumah untuk tempat tinggal.

"Pada 2021, SMF telah mengalirkan dana pendamping untuk mendukung penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)," papar Menkeu, Sabtu (12/3).

Dana tersebut merupakan PMN yang diberikan pemerintah sebesar Rp2,25 triliun pada 2021, yang dicampur dengan dana dari penerbitan surat utang. Kemudian digunakan untuk mendukung program KPR FLPP dalam memenuhi target subsidi pembiayaan KPR FLPP bagi 157.500 unit rumah pada 2021 bagi MBR.

Menkeu menyebut, program tersebut merupakan sinergi SMF dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU PPDPP) Kementerian PUPR. di mana SMF menyediakan 25% dari porsi penyaluran dana KPR FLPP, sedangkan 75% porsi lainnya disediakan BLU PPDPP.

Pada 2021 penyaluran dana KPR FLPP mencapai Rp24,19 triliun untuk 178.828 unit rumah, dengan porsi PPDPP sebesar 75% atau Rp19,58 triliun. Terdiri dari dana APBN senilai Rp16,62 triliun dan pengembalian pokok sebesar Rp2,96 triliun, sementara porsi SMF sebesar 25% atau Rp4,62 triliun.

<https://www.validnews.id/ekonomi/dpr-milenial-belum-banyak-tahu-insentif-pembelian-properti>



15 / 03 / 2022

Sumber: tribunnews.com

Kementerian PUPR Ajak Pengembang Garap Pasar Milenial untuk Tekan Backlog Perumahan

Penulis: Yanuar R Yovanda
Editor: Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian PUPR mengajak pengembang dan stakeholder sektor properti menggarap pasar milenial untuk menekan backlog perumahan di Indonesia.

Staf Khusus Menteri Bidang Perumahan Kementerian PUPR Iskandar Saleh menilai sektor properti yang didukung konsumen milenial akan semakin tumbuh positif tahun ini.

"Kami mengajak para stakeholder sektor perumahan untuk bahu membahu mencapai target yang ditetapkan pemerintah," ujarnya di webinar "Properti Sebagai Lokomotif PEN: Memaksimalkan Potensi Hunian Milenial dan MBR sebagai Andalan Sektor Properti", ditulis Selasa (15/3/2022).

Dia mengungkapkan, pemerintah dalam RPJMN 2020 hingga 2024 menargetkan pengurangan backlog dari semula 11 juta unit menjadi 6,7 juta unit.

Sementara untuk tahun ini, sasaran itu dijabarkan dalam sejumlah program, di antaranya Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 200 ribu unit dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) 200 ribu unit.

Selain itu, ada program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) 312 unit, BP Tapera 100 ribu unit, dan dari PT. Sarana Multigriya Finansial (SMF) 10 ribu unit.

"Besaran tersebut menjadi tantangan, sekaligus peluang kita bersama," kata Iskandar.

Dia menambahkan, pemberian stimulus di sektor properti berlanjut tahun ini, di antaranya bantuan pembiayaan perumahan dan perpanjangan fasilitas PPN ditanggung pemerintah alias diskon pajak.

"Kemudian, penetapan suku bunga acuan Bank Indonesia rendah, relaksasi LTV/FTV atau DP nol persen, relaksasi ATR sektor properti menjadi 20 persen hingga 35 persen, dan pemberian masa transisi penerbitan Persetujuan Pembangunan Gedung (PPG) bagi pemda yang belum memiliki perda tentang PPG," pungkasnya.

<https://m.tribunnews.com/properti/2022/03/15/kementerian-pupr-ajak-pengembang-garap-pasar-milenial-untuk-tekan-backlog-perumahan>



15 / 03 / 2022

Sumber: beritasatu.com

BP Tapera Optimistis Capai Target Pembiayaan Rumah Subsidi

Oleh : Imam Muzakir

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (**BP Tapera**) optimistis mampu menyelesaikan target pembiayaan **rumah subsidi** tahun 2022 yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Kami optimistis optimalisasi target tahun 2022 tercapai. Hal ini terlihat dari optimisme bank penyalur dan pengembang dalam menyediakan rumah subsidi yang memperlihatkan tren yang meningkat," ungkap Komisioner BP Tapera, Adi Setianto, dalam siaran pers, Selasa (15/3/2022).

Adi Setianto mengatakan, BP Tapera berupaya menjaga agar pengelolaan dana FLPP sesuai dengan tujuan investasi pemerintah.

"Hal itu sejalan dengan amanah yang diberikan untuk mengoptimalkan dana FLPP sehingga dapat menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk memfasilitasi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau," imbuhnya.

Menurut Adi, sejak ditunjuk sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) pada 22 Desember 2021 dan setelah dikeluarkannya izin penyaluran dana FLPP oleh Kementerian Keuangan pada 17 Februari 2022 lalu, penyaluran dana FLPP terus memperlihatkan perkembangan yang sangat menjanjikan.

Penyaluran dana FLPP per 11 Maret 2022 telah mencapai 27.257 unit senilai Rp 3,01 triliun. Sehingga total penyaluran dana FLPP selama periode 2010-2022 sudah mencapai 970.836 unit senilai Rp 78,19 triliun.

Pada tahun 2022, BP Tapera ditargetkan menyalurkan pembiayaan FLPP sebanyak 200.000 unit rumah dan optimalisasi sebesar 26.000 unit rumah dengan alokasi pendanaan sebesar Rp23 triliun (Rp19,1 triliun dari alokasi APBN 2022 dan Rp3,9 triliun dari pengembalian pokok).

"Sebagai OIP kami menegaskan kualitas rumah dan ketepatan sasaran adalah prioritas utama dalam penyaluran dana pembiayaan perumahan bagi MBR," ujar Adi.

BP Tapera merupakan Operator Investasi Pemerintah pertama yang mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2019 tentang investasi pemerintah.

Dalam kontrak kinerja yang ditandatangani, Kemenkeu dan BP Tapera, dalam rangka mewujudkan tujuan investasi pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi hasil, BP Tapera dituntut kinerjanya atas tiga sasaran strategis dan enam indikator kinerja utama.

Pertama, layanan prima dengan indikator kinerja utama, realisasi penyaluran dana FLPP, tingkat keterhunian rumah oleh



KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

15 / 03 / 2022

| Sumber: beritasatu.com

MBR. Kedua, peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana FLPP yang berkesinambungan dengan indikator kinerja utama, rekonsiliasi dengan bank penyalur.

"Kami berharap pengelolaan investasi dana FLPP yang dijalankan pada BP Tapera akan

menjadi role model bagi investasi-investasi pemerintah lainnya," tutur Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Hadiyanto,

<https://www.beritasatu.com/ekonomi/902965/bp-tapera-optimistis-capai-target-pembiayaan-rumah-subsidi/?view=all>



16 / 03 / 2022

Sumber: kompas.com

Guyur Rp 3,01 Triliun, BP Tapera Optimistis Capai Target Pembiayaan FLPP 2022

Penulis: Suhaiela Bahfein

Editor: Hilda B Alexander

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) telah menyalurkan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp 3,01 triliun untuk membiayai 27.257 unit rumah per 11 Maret 2022.

Sehingga, total penyaluran dana FLPP selama periode 2010-2022 sudah mencapai 970.836 unit senilai Rp 78,19 triliun.

Pada tahun 2022, BP Tapera ditargetkan menyalurkan pembiayaan FLPP sebanyak 200.000 unit rumah dan optimalisasi sebesar 26.000 unit rumah dengan alokasi pendanaan sebesar Rp 23 triliun.

Dana tersebut terdiri dari Rp 19,1 triliun dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 dan Rp 3,9 triliun dari pengembalian pokok.

"Kami optimistis optimalisasi target tahun 2022 tercapai," tegas Komisioner BP Tapera Adi Setianto dalam rilis, Selasa (15/3/2022).

Menurut Adi, ini terlihat dari optimisme bank penyalur dalam menyalurkan dana FLPP dan pelaku pembangunan atau pengembang dalam menyediakan rumah subsidi yang memperlihatkan tren peningkatan.

Sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP), Adi menyampaikan, BP Tapera

memperhatikan kualitas rumah dan ketepatan sasaran sebagai prioritas utama dalam penyaluran dan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

BP Tapera merupakan OIP pertama yang mengimplementasikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah.

Dalam kontrak kinerja yang ditandatangani Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan BP Tapera, OIP tersebut dituntut atas tiga sasaran strategis dan enam indikator kinerja utama.

Pertama, layanan prima dengan indikator kinerja utama realisasi penyaluran dana FLPP dan tingkat keterhunian rumah oleh MBR.

Kedua, peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana FLPP yang berkesinambungan dengan indikator kinerja utama rekonsiliasi dengan bank penyalur dan penyelesaian temuan auditor.

Ketiga, terkait kinerja pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel dengan indikator kinerja utama ketepatan waktu pencairan alokasi dana sesuai rencana penarikan dana dan realisasi jumlah imbal hasil dana FLPP yang disetorkan ke Rekening Investasi BUN (RIBUN).



KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

16 / 03 / 2022

| Sumber: [kompas.com](https://www.kompas.com)

"Kami berharap pengelolaan investasi dana FLPP yang dijalankan pada BP Tapera akan menjadi role model bagi investasi-investasi pemerintah lainnya," pungkas Direktur Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan Kemenkeu Hadiyanto.

<https://www.kompas.com/properti/read/2022/03/16/070000321/guyur-rp-3-01-triliun-bp-tapera-optimistis-capai-target-pembiayaan-flpp>